

Facilitas Wifi Gratis Bagi Pelajar

KLATEN (KR) - Pemerintah Desa (Pemdes) Bogem, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten menyediakan ruang belajar bagi pelajar yang ingin mengerjakan tugas sekolah.

Ruang belajar dilengkapi fasilitas wifi gratis. Sekretaris Desa (Sekdes) Bogem Hariyanta, mengatakan, ruang belajar dengan fasilitas wifi gratis disediakan di kantor desa dengan tujuan mendukung kegiatan belajar mengajar (KBM) putra-putri, mengingat pada masa pandemi Covid-19 kegiatan sekolah dilakukan secara daring.

"Sebenarnya wifi gratis ini sudah ada sejak tahun 2007. Pada saat itu banyak tugas-tugas yang harus mencari di internet, makanya kami memfasilitasi wifi. Apalagi saat ini masa pandemi Covid-19 sehingga cukup membantu siswa dalam belajar daring," ujarnya, Senin (3/8).

Dijelaskan, wifi sangat dibutuhkan tak hanya untuk kegiatan belajar. Namun juga untuk mendukung pekerjaan pemerintah desa. Hal ini mengingat tak semua jaringan provider bisa terakses karena letak geografis desa di perbukitan.

"Kita pasang dua wifi, satu untuk belajar siswa dan yang satu untuk mendukung pekerjaan desa. Rencananya akan memasang wifi lagi di gedung olahraga, gratis untuk belajar siswa," ujarnya.

Salah satu pelajar SMP, Dika Saputra, mengaku senang ada fasilitas wifi gratis di Kantor Desa Bogem. Sehingga bisa membantu dirinya dan teman-temannya dalam mengerjakan tugas sekolah secara daring. **(Lia)**

Letkol Inf Lukman Hakim Dandim Purworejo



KR-Gunarwan

Bupati Purworejo Agus Bastian menyerahkan kenang-kenangan kepada Letkol (Inf) Muchlis Gasim.

PURWOREJO (KR) - Jabatan Komandan Kodim 07-08 Kabupaten Purworejo diserahkan dari Letkol (Inf) Muchlis Gasim SH MSI kepada pejabat baru Letkol (Inf) Lukman Hakim SSos MSI.

Muchlis Gasim dipercaya mengemban tugas baru sebagai Wakil Kepala Penerangan Kodam 4/Diponegoro. Sedang Lukman Hakim sebelumnya bertugas sebagai Kepala Tim Penelitian di Akademi Militer Magelang, pernah bertugas di Kostrad selama 17 tahun.

"Saya belum pernah bertugas di wilayah satuan teritorial," kata Lukman Hakim, Rabu (5/8). Lukman Hakim berharap dukungan semua pihak, terutama Forkopimda Kabupaten Purworejo dan semua elemen masyarakat, untuk kelancaran tugas sebagai Dandim Purworejo. "Kami akan terus membangun kerja sama dengan Pemkab Purworejo," tandasnya.

Lukman Hakim lulusan secapa tahun 2000, pernah bertugas di Kalimantan selama 3 tahun. "Sekarang saya akan mengabdikan diri di Kabupaten Purworejo," tandasnya.

Di sela-sela pisah sambut di pendapa rumah dinas Bupati Purworejo, Muchlis Gasim menilai bahwa kehidupan masyarakat Purworejo cukup guyub. Tidak ada konflik sosial dan lainnya.

"Kalaupun ada, paling menjelang Pilkada atau pemilihan lainnya, itu pun bisa diredam. Tentu ini atas kerja sama yang baik semua pihak, sehingga bisa tercipta situasi yang kondusif di Purworejo," katanya.

Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM mengakui bahwa Kodim merupakan mitra pemerintah dalam membangun Kabupaten Purworejo. **(Nar)**

Tim Prato Farm Salurkan Hewan Kurban

MAGELANG (KR) - Tim Prato Farm Hewan Kurban Yogyakarta 2020 menyalurkan bantuan dua ekor sapi dan 107 ekor kambing bantuan dari umat muslim Singapura di berbagai wilayah di Jateng dan DIY pada hari Raya Idul Adha 1441 H.

Koordinator penyaluran hewan kurban bantuan umat muslim Singapura, Triatmoko mengatakan, bantuan tersebut berasal dari perwakilan umat Muslim Singapura, Prato Januri.

"Hewan-hewan kurban tersebut dibagikan di wilayah Jateng tepatnya di Pedukuhan Ngargoretro, Segabuk, Salaman Magelang dan Padusan Borobudur. Sedangkan yang di wilayah DIY meliputi Semin Gunungkidul dan di Kabupaten Kulonprogo," kata Triatmoko, Minggu (2/8).

Diungkapkan, dalam proses pendistribusian bantuan hewan kurban dari umat muslim Singapura melalui Prato Januri memang tidak mulus. Apalagi pada hari Raya Idul Adha tahun ini bertepatan dengan pandemi Covid-19 dan wilayah cakupan pendistribusian bantuan cukup sulit dijangkau.

"Bantuan hewan kurban melalui Tim Prato Farm memang dikhususkan bagi warga yang berada di kawasan atau daerah pelosok perbatasan, yang tidak mendapat bantuan daging hewan kurban selain yang kami serahkan," ungkapnya. **(Bag)**



KR-Istimewa

Petugas Prato Farm sedang menangani hewan kurban di Segabuk Salaman Magelang.

Banggar DPRD Grobogan Mulai Bahas KUA-PPAS APBD 2021



GEMA DPRD KAB. GROBOGAN



GROBOGAN (KR) - DPRD Grobogan melalui Badan Anggaran (Banggar) mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Grobogan 2021. Rapat kerja Banggar dilaksanakan secara maraton mulai pagi hingga malam selama dua hari berturut-turut.

"Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 20-21 dibuat untuk pedoman pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan APBD Grobogan tahun anggaran 2021," ujar Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto SSos, saat memimpin rapat kerja Banggar di ruang Paripurna I DPRD, Rabu (5/8). Hadir dalam rapat tersebut, Sekda Grobogan dr HM Sumarsono MSI, dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). PPAS Kabupaten Grobogan di dalamnya memuat

program pemerintah provinsi dan pemkab terhadap prioritas pembangunan nasional, sinkronisasi kebijakan pemkab dengan prioritas pembangunan provinsi, dan prioritas pembangunan daerah yang tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 20-21.

Dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Mendagri. Dengan demikian, penyusunan rancangan KAU-PPAS Kabupaten Grobogan 2021 harus berpedoman pada RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2021, yang di dalamnya memuat prioritas pembangunan daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional dan prioritas Pro-

vinisi Jateng tahun 2021.

Mengacu pada pedoman penyusunan APBD 2021, Agus Siswanto sinergitas kebijakan Pemkab Grobogan dengan kebijakan nasional dan Provinsi Jateng yang telah tertuang dalam RKPD kemudian dituangkan dalam rancangan KUA dan PPAS yang disepakati Pemkab bersama DPRD Grobogan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda tentang APBD Grobogan tahun 2021 yang telah disinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Jateng tahun 2021.

Berpedoman pada RKPD Kabupaten Grobogan tersebut, ada lima rumusan prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan tahun 20-21. Yaitu penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah (Rakyat Semangat, Ekonomi Kuat), peningkatan kualitas dan daya saing

SDM menuju masyarakat sehat dan generasi smart, pengembangan kualitas infrastruktur dan ketahanan bencana (Berhias Kotaku, Tangguh Grobogan-ku).

Kemudian penanggulangan kemiskinan dengan Gerakan Bersama Berantas Kemiskinan (Geber Taskin) dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien guna mendukung pelayanan publik dan kinerja pembangunan daerah (ASN yang smart dan birokrasi yang melayani).

Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam KUA tahun anggaran 2021,

total pendapatan daerah tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp 2.568.035.613.-042. Pendapatan sebesar itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 313.-877.244.024, pendapatan dari transfer Rp 2.254.-158.369.000, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 148.230.300.000. Kemudian penerimaan pembiayaan daerah direncanakan Rp 164.409.540.-954. Penerimaan pembiayaan sebesar itu berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Rp 14.-409.540.964 dan penerimaan pinjaman daerah Rp 150.000.000.000. **(Tas)**



KR-M Taslim

DPDR Grobogan lakukan pembahasan soal KUA-PAS APBD 2021

PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-YOGYAKARTA

Sosialisasi-Konsultasi Publik Langgar Aturan

KLATEN (KR) - Proyek strategis nasional (PSN) pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta telah dimulai. Di Kabupaten Klaten, tahap awal proyek dimulai dengan sosialisai dan konsultasi publik pengadaan tanah yang dilaksanakan dari tanggal 4 - 25 Agustus 2020.

Tahapan ini memicu persoalan di tingkat masyarakat terdampak. Ketua Paguyuban Warga Terdampak jalan tol Solo-Yogyakarta wilayah Klaten, Himawan Pambudi, menyampaikan proses pemberitahuan rencana pembangunan (sosialisasi) dan konsultasi publik pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta yang dilaksanakan pada waktu bersamaan tidak sesuai dengan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang di-

atur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012.

"Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 16, 17, 19 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 16, 19, bahwa kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik harus dilakukan secara terpisah pelaksanaannya, karena memiliki tujuan yang berbeda. Sosialisasi bersifat pemberitahuan kepada masyarakat luas dan terdampak. Sedangkan konsultasi publik bertujuan untuk mendapatkan ke-

sepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak," kata Himawan, Rabu (05/08).

Selain itu, pematokan yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah seharusnya secara etis di dahului dengan sosialisasi agar warga terdampak mengetahui apa maksud dan tujuan dari pematokan tersebut. Sedangkan proses yang terjadi sekarang adalah dipatok dulu baru disosialisasikan.

Pada sosialisasi dan konsultasi publik pengadaan tanah tahap pertama, Selasa (4/8), Kepala Seksi (Kasi) Fasilitas Pengadaan Tanah dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jateng, Gaffar Moh Nadsir, menyampaikan beberapa poin penting tahapan pengadaan tanah. Sesuai UU Nomor 2 Tahun

2012 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 serta Perpres Nomor 148 Tahun 2015 ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yakni tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan.

Gaffar menguraikan, tahap perencanaan merupakan ranah Kementerian PUPR dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jalan tol Solo-Yogyakarta, yakni membuat dokumen perencanaan.

Dalam dokumen itu memuat maksud dan tujuan, tata ruang, luas tanah, status tanah, letak tanah, jangka waktu pengadaan tanah, jangka waktu pembangunan, perkiraan nilai tanah, dan penganggaran. Dokumen perencanaan ini kemudian diserahkan kepada gubernur. **(Lia)**

Kurban Sebagai Penguatan Dakwah

MAGELANG (KR) - Pada Idul Adha 1441 H ini, Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu melalui program Kurban Penguatan Dakwah melaksanakan beberapa kegiatan. Kegiatan dimulai dengan menerjunkan santri dan dai ke dusun-dusun binaan di lereng Merapi Merbabu hingga pelaksanaan salat Idul Adha bersama warga Dusun Windusajan Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan Magelang. "Untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban terkumpul 16 sapi dan 5 kambing," jelas Pengurus Yayasan Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu Abah Fanni, Rabu (5/8).

Dijelaskan, dalam pelaksanaan penyembelihan dihadiri sejumlah pengurus yayasan Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu, yakni ustad Salim AFillah dan Kang Puji. Bahkan yang menyembelih juga pengurus yayasan dan Mudir Pesantren ustad Musthofa. Dijelaskan, daging kurban didistribusikan di 25 dusun binaan Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu. Melalui program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **(Feb)**

Gubernur Jateng Hadiri Pengukuhan Polosoro

PURWOREJO (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo 'hadir' dalam pengukuhan pengurus Paguyuban Kepala Desa, Lurah dan Perangkat Desa Purworejo (Polosoro) di Pendapa Kabupaten Purworejo, Rabu (5/8).

Gubernur melakukan siaran langsung dengan aplikasi telekonferensi dan berpesan agar kepala desa fokus membantu pemerintah dalam menekan pertambahan kasus Covid-19 di wilayahnya.

Ganjar Pranowo mengingatkan, tugas pemerintah semakin berat merespons perkembangan Covid-19, apabila tidak didukung peran serta masyarakat, termasuk desa. "Situasi tidak mudah, ini ujian yang paling berat dan agar ringan, maka kita harus bergandengan tangan. Butuh kerja sama elemen pemerintahan dan masyarakat," tegas Ganjar Pranowo.

Selain itu, Ganjar Pranowo mengingatkan para kades untuk konsisten menerapkan program Jogo Tonggo Covid-19. Jogo Tonggo adalah salah satu ujung tombak penanganan Covid-19 yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Gubernur mengapresiasi suksesi kepemimpinan Polosoro periode 2020 - 2023.

Pengukuhan pengurus Polosoro dilakukan Bupati Purworejo Agus Bastian. Dalam sambutannya, bupati mengemukakan, Polosoro harus kokoh dan fokus mendorong pembangunan di desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, katanya, tetap akan fokus membangun desa dengan mengalokasikan Dana Desa (DD) untuk tahun 2020 dan 2021.

Ketua Umum Polosoro Suwarto menambahkan, pengurus akan segera melaksanakan rapat kerja untuk menentukan program. Para pengurus, lanjutnya, akan fokus mengawal tata niaga pupuk yang saat ini masih kendala bagi petani Purworejo.

"Untuk jangka pendek, isu kelangkaan pupuk akan kami kawal. Adapun terkait pilkada, kami bersikap netral," tandasnya. Sebanyak 26 kepala desa dilantik dan dikukuhkan sebagai pengurus Polosoro. Suwarto Kades Jatimalang menjabat Ketua Umum Polosoro, sedangkan Ketua 1 dijabat Sutanto (Kades Loano), Ketua 2 Turahman (Kades Girimulyo), Sekretaris Umum Dwinanto (Kades Krandegan), dan Sri Siswoko (Kades Sendangsari) sebagai Bendahara Umum Polosoro. **(Jas)**

Bansos Covid-19 Kebumen Rp 13,7 Miliar

KEBUMEN (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen memutuskan alokasi dana untuk bantuan sosial (bansos) tunai dan nontunai bagi warga terdampak Covid-19 yang bersumber dari APBD Kebumen 2020, besarnya Rp 13,7 miliar.

"Saat ini dananya sudah ada dan siap disalurkan," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kebumen, Aden Andri Susilo MSI, di ruang kerjanya, Selasa (4/8). Penyaluran bansos APBD Kebumen 2020 tersebut menurut Aden dikelola Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kebumen. BPKAD Kebumen hanya menyiapkan ketersediaan anggarannya, setelah itu penyusunan data warga penerima manfaat, pembuatan regulasi berupa peraturan bupati dan penentuan waktu penyalurannya dilakukan oleh Dinsos PPKB Kebumen," ujar Aden.

Terpisah, Sekretaris Dinsos PPKB Kebumen Kinanto SIP, menjelaskan bahwa hingga Selasa (4/8) Dinsos PPKB Kebumen masih menyelesaikan proses verifikasi data warga penerima manfaatnya. Adapun Peraturan Bupati (Perbup) Kebumen sudah berhasil terselesaikan.

"Setelah verifikasi data selesai, kami baru bisa menyalurkannya kepada warga penerima manfaat. Berhubung verifikasi data di 460 desa dan kelurahan di 26 kecamatan di Kebumen sampai hari ini belum selesai, kami belum bisa mengumumkan waktu penyalurannya," ujar Kinanto. **(Dwi)**



KR-Chandra AN

PENDIDIKAN sekolah pola dalam jaringan (daring) meski efektif menggantikan tatap muka yang berpotensi mengundung kerawanan penularan Covid-19, namun dirasa memberatkan masyarakat, terutama keluarga pra-sejahtera dan orang tua yang memiliki kesibukan kerja. Bagi keluarga pra-sejahtera, kebutuhan smartphone serta kuota internet untuk sarana belajar anak-anak mereka sulit dijangkau dan tak terbeli. Sedangkan bagi orang tua yang sibuk bekerja akan sangat sulit bisa mendampingi anak-anaknya belajar di rumah sendirian, khususnya anak-anak mereka yang masih berpendidikan sekolah dasar (SD). Dalam foto, Arjuna siswa SDIB An Nissa Semarang masih biasa didampingi orang tuanya melakukan video conference secara kelompok dengan teman-teman kelasnya, Selasa (4/8). Bagi mereka yang tidak didampingi orang tua dan memiliki keterbatasan sarana, tentunya akan menjadi kendala tersendiri.